



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Ambon Ekspres**

## **Diperiksa 3 Kali Digarap 3 Jam**

Jumat, 15 Juli 2016



**AMBON, AE.**— Datang memenuhi panggilan jaksa Kejaksaan Tinggi Maluku, Ibrahim Sangadji memilih menghindar sorotan media. Dia memilih jalur “aman” agar tak diketahui kedatangannya. Masuk ruang pemeriksaan juga tak diketahui. Dia digarap jaksa tiga jam lebih. Sangadji pun Nampak tegang.

Ibrahim Sangadji adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Maluku. Dia diperiksa Kamis kemarin oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, terkait dugaan korupsi pengadaan wifi di Kantor Gubernur Maluku. Sangadji diperiksa untuk ketiga kalinya. Uniknya pemeriksaan ketiga dia digarap tiga jam.

Kali ini Ibrahim Sangadji “digarap” oleh tim penyidik Kejati Maluku, selama tiga jam. Pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Infokom itu, berlangsung pukul 14.00 WIT. Kurang lebih 15 pertanyaan dilontarkan jaksa.

Pertanyaannya, masih seputar proyek pengadaan wifi pada Kantor Pemprov Maluku tahun 2015. Selesai diperiksa, dia langsung pergi meninggalkan kantor Kejati Maluku tanpa meninggalkan informasi pemeriksaan kepada awak media.



## **SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Ambon Ekspres**

Dia Nampak tegang. Raut wajahnya menunjukkan ketidaktenangan. Berbeda dengan awal diperiksa, Sangadji kemarin irit bicara. Tak ada layanan wawancara yang diberikan kepada wartawan yang sudah menunggu sejak beberapa jam. Ditanya pun, Sangadji bergeming.

Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette ketika dikonfirmasi membenarkan soal permintaan keterangan dari Ibrahim Sangadji. “Iya memang hari ini (kemarin, red) tim mengagendakan permintaan keterangan dari Kadis Infokom setelah sebelumnya sempat ditunda,” kata Sapulette, Kamis (14/7).

Ditanya soal siapa lagi yang akan dipanggil, Sapulette belum mengetahuinya. Menurutnya, tergantung agenda dari tim yang melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. “Nanti kita lihat kedepannya, siapa lagi yang akan dipanggil oleh tim. Jadi teman-teman pantau saja. Karena memang masih penyelidikan sehingga belum bisa seperti penyelidikan,” terangnya.

Sementara itu, data yang berhasil dihimpun koran ini dilingkup Kejati Maluku menyebutkan, anggaran pengadaan Wifi tahun 2015 sebesar Rp 600 juta lebih yang dilakukan melalui pihak ketiga, ternyata pembayarannya lebih mahal.

Menggunakan pihak ketiga, bayarannya Rp 56 juta per bulan. Padahal, jika pihak dinas yang berhubungan langsung atau membayar langsung kepada Telkom, maka pembayarannya lebih murah. Sekitar Rp 30 juta lebih. Di tahun 2015 tersebut, entah kenapa belum dilakukan pembayaran selama tiga bulan terakhir.

Akibatnya, menimbulkan kerugian terhadap pihak Telkom. Bahkan, di tahun 2014, pihak Telkom mengalami kerugian ratusan juta, karena pengadaan Wifi telah dilakukan, padahal anggaran untuk pengadaan Wifi belum tersedia.**(AFI)**